



SEKRETARIAT  
DPRD KOTA MEDAN

BerAKHLAK # bangga  
melayani  
bangsa

# KOLABORASI  
MEDAN BERKAH

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN Tahun 2021 - 2026

PLANNING

SMART - WAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan atas ijinNya, Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026 selesai disusun. Perubahan Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang didasarkan kepada: Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026, Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan terdahulu dan dokumen pendukung lainnya.

Perubahan Rencana Strategis 2021-2026 ini merupakan langkah maju dalam mewujudkan visi Sekretariat DPRD Kota Medan. Kami mengakui bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang kokoh, tetapi juga pada kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terus menerus. Oleh karena itu, perubahan ini dirancang untuk memberikan daya dorong baru bagi inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan berkelanjutan.

Demikian Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026 ini disusun, kiranya melalui Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat untuk kinerja yang lebih baik bagi Sekretariat DPRD Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan.

Medan, Desember 2023

**SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN,**

**MUHAMMAD ALI SIPAHUTAR, S.STP., M.A.P**

**PEMBINA TINGKAT I**

**NIP. 19790317 199912 1 001**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	8
BAB II.....	10
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	10
2.2 SUMBER DAYA.....	22
2.3 KINERJA PELAYANAN.....	28
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN.....	92
BAB III.....	96
3.1 PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN.....	96
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.....	99
3.3 TELAAHAN RENSTRA.....	103
3.4 TELAAH RTRW DAN KLHS.....	103
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	104
BAB IV.....	106
BAB V.....	109
BAB VI.....	117
6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN.....	117
6.2 Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	122
6.3 Kelompok Sasaran.....	135
6.4 Pendanaan Indikatif.....	136
BAB VII.....	149
BAB VIII.....	151

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 SDM Sekretariat DPRD Kota Medan Berdasarkan Pangkat/ Golongan dan Pendidikan Tahun 2023.....	23
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kota Medan.....	26
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan 2016-2021 .....	29
Tabel 2.4. Produk DPRD Kota Medan 2021-2026.....	30
Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan 2016-2021 .....	90
Tabel 3.1. Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	96
Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan Berdasarkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih.....	102
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	108
Tabel 5.1. Analisis faktor-faktor internal Sekretariat DPRD Kota Medan.....	110
Tabel 5.2. Analisis faktor-faktor eksternal Sekretariat DPRD Kota Medan ..	112
Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	115
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Program .....	122
Tabel 6.2. Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan .....	123

Tabel 6.3. Indikator Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.....	128
Tabel. 6.4. Kerangka Pendanaan Indikatif .....	137
Tabel 7.1. IKU Sekretariat DPRD Kota Medan.....	149
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	150

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Medan.....13
- Gambar 5.1. Matriks Posisi Strategis Sekretariat DPRD Kota Medan.....114

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota Medan untuk periode waktu 2021-2026. Dokumen Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama lima tahun, sesuai periode Renstra. Oleh karena itu, dokumen Perubahan Renstra ini memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memfasilitasi Anggota DPRD, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan.

Proses penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan tentu melibatkan para pemangku kepentingan yang berasal dari Pimpinan dan Anggota DPRD, internal Sekretariat DPRD dan Bappeda Kota Medan. Proses tersebut ditempuh karena perlu dilakukan penyesuaian dalam penyusunannya. Tahap dimaksud antara lain meliputi reviu atas Renstra induk, sinkronisasi dengan perubahan RPJMD Kota Medan, penyusunan, koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi dengan Bappeda Kota Medan, serta verifikasi oleh Bappeda Kota Medan. Adapun pelibatan para pemangku kepentingan tersebut dimaksudkan agar Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan dapat memuat harapan para pemangku kepentingan, khususnya

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan sebagai pemangku kepentingan utama yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Kota Medan. Dalam proses penyusunan tersebut juga dipastikan bahwa perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan memiliki kesinkronan dengan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan. Sebagai bagian dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan, maka muatan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan harus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana dituangkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dalam proses perumusan dokumen perubahan Renstra ini, dokumen Perubahan RPJMD Kota Medan diposisikan sebagai referensi utama. Secara substantif, dokumen perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan dapat dipandang sebagai turunan dari dokumen perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Tahap awal sinkronisasi tersebut dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan melalui identifikasi sasaran-sasaran dan target dalam dokumen perubahan RPJMD Kota Medan yang relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan. Sasaran dan target dalam perubahan RPJMD Kota Medan tersebut yang kemudian dijadikan acuan Sekretariat DPRD Kota Medan dalam penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026. Dalam tahap berikutnya, proses sinkronisasi Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan dengan Perubahan RPJMD Kota Medan juga dilakukan oleh Bappeda Kota Medan. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya kesesuaian antara perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026 dengan perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 7);
20. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 48);
21. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 97);
22. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 60).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan adalah:

- a. Tersedianya dokumen perencanaan bagi Sekretariat DPRD Kota Medan, yang memuat arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan penyampaian pelayanan administratif kepada DPRD Kota Medan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan. Dengan demikian, dokumen tersebut menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD Kota Medan dalam penentuan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran tahunan, monitoring, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja dalam kurun waktu lima tahunan; dan
- b. dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Medan setiap tahunnya, sampai sisa periode Renstra.

#### **2. Tujuan**

Berdasarkan maksud tersebut dan mengingat substansi Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan mencakup visi, misi, tujuan, strategi, program, kegiatan, dan subkegiatan secara lintas sumber pembiayaan, maka tujuan penyusunan Perubahan Renstra ini adalah:

- a. Memberikan arah bagi Sekretariat DPRD Kota Medan agar dapat berkinerja unggul dalam pemberian pelayanan (fasilitatif) kepada DPRD Kota Medan. Setiap unit kerja yang ada di Sekretariat DPRD Kota Medan diharapkan dapat mengembangkan langkah-

langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan administratif kepada DPRD Kota Medan sehingga terwujud suatu pelayanan yang prima;

- b. Digunakan sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kota Medan dalam mengembangkan *good governance* di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan;
- c. Digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan sebagai media pertanggungjawaban yang disampaikan secara melembaga; dan
- d. Dapat membentuk penyusunan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara keseluruhan.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I : Pendahuluan**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

**Bab II : Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan**

Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi; Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan.

**Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Medan**

Memuat Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Renstra; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Penentuan Isu-isu Strategis.

**Bab IV : Tujuan dan Sasaran**

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Medan.

**Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Medan dalam periode renstra.

**Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Memuat indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

**BabVIII : Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Pada Pasal 204 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa :

1. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah;
3. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas adalah untuk menyelenggarakan fungsi administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Tugas Sekretariat DPRD Kota Medan adalah menyelenggarakan

administratif kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

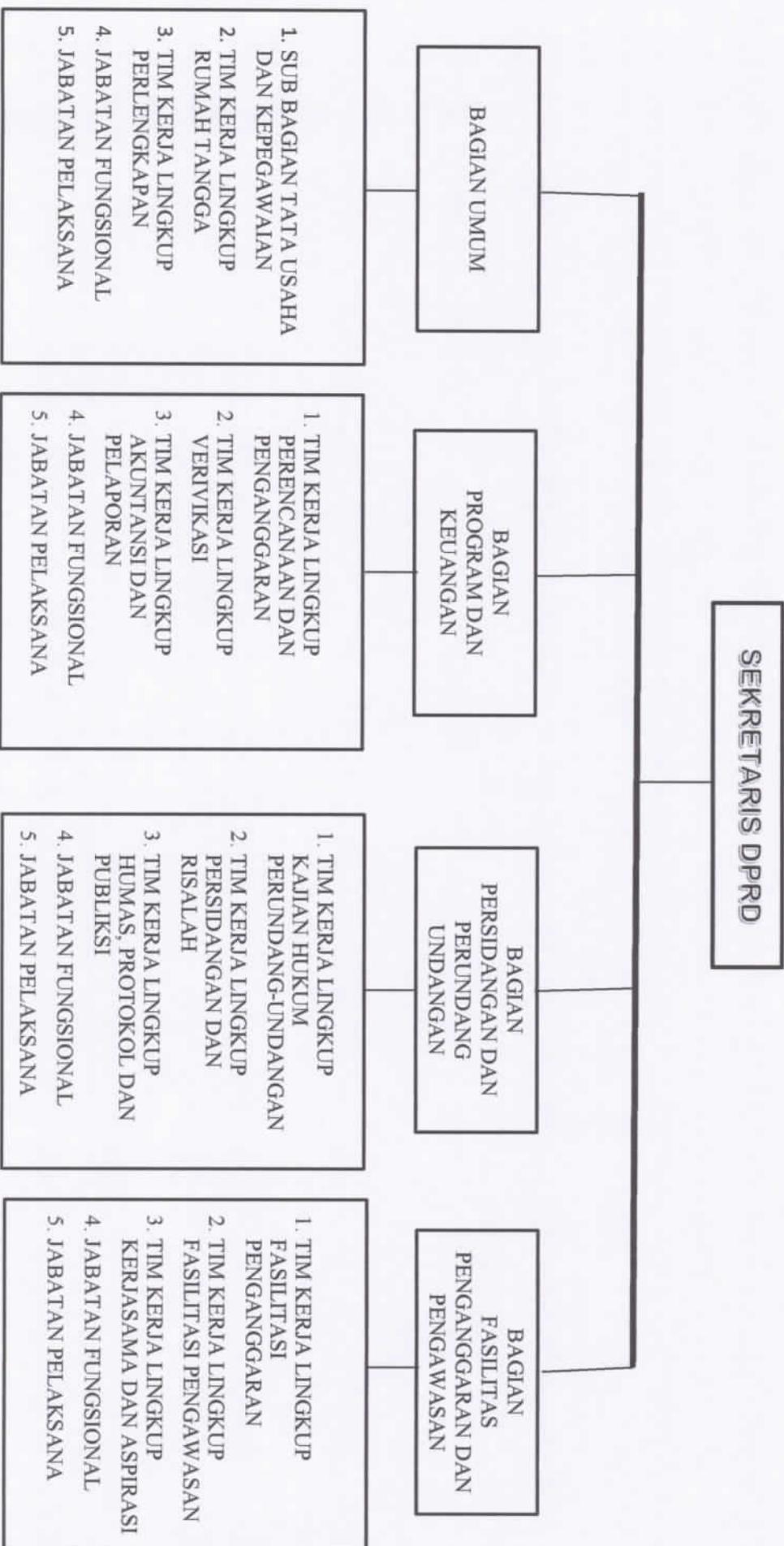
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD
2. Kepala Bagian Umum, membawahi :
  - a. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  - b. Tim Kerja Lingkup Rumah Tangga;
  - c. Tim Kerja Lingkup Perlengkapan;
  - d. Jabatan Fungsional; dan
  - e. Jabatan Pelaksana.
3. Kepala Bagian Program dan Keuangan, membawahi :
  - a. Tim Kerja Lingkup Perencanaan dan Penganggaran;
  - b. Tim Kerja Lingkup Verifikasi;

- c. Tim Kerja Lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
  - d. Jabatan Fungsional; dan
  - e. Jabatan Pelaksana.
4. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, membawahi :
- a. Tim Kerja Lingkup Kajian Perundang-Undangan;
  - b. Tim Kerja Lingkup Persidangan dan Risalah;
  - c. Tim Kerja Lingkup Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi;
  - d. Jabatan Fungsional; dan
  - e. Jabatan Pelaksana.
5. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahi :
- a. Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Penganggaran;
  - b. Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Pengawasan;
  - c. Tim Kerja Lingkup Kerjasama dan Aspirasi;
  - d. Jabatan Fungsional; dan
  - e. Jabatan Pelaksana.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Medan



Adapun tugas organisasi yang ada pada masing-masing unit kerja di Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebagai berikut :

**1. Bagian Umum**

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program kegiatan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Sekretariat DPRD untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya Lingkup Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (Reward and Punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Sekretariat DPRD berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi Perlengkapan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, dan umum lainnya Lingkup Sekretariat DPRD agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;

- e. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- f. Fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- g. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- h. Penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
- i. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- j. Pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan Rumah Tangga DPRD;
- k. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- l. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup Bagian Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- m. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- n. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris DPRD; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

## **2. Bagian Program dan Keuangan**

Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program kegiatan pengelolaan anggaran, verifikasi dan pelaporan di Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Lingkup Sekretariat DPRD dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis,

- dan rencana kerja Sekretariat DPRD untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, Penyusunan bahan kebijakan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya Lingkup Bagian Program dan Keuangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (Reward and Punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Bagian Program dan Keuangan berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  - d. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan Lingkup Sekretariat DPRD;
  - e. Penyusunan bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baik murni maupun perubahannya;
  - f. Verifikasi perencanaan kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat DPRD;
  - g. Verifikasi kebutuhan Perlengkapan Sekretariat DPRD;
  - h. Pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, Verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - i. Pengelolaan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

- j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- k. Verifikasi pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- l. Penyelenggaraan fungsi perbendaharaan keuangan lingkup DPRD dan Sekretariat DPRD;
- m. Penyusunan anggaran DPRD;
- n. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup Bagian Program dan Keuangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- o. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- p. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris DPRD; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan Tugas dan Fungsinya

### **3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program kegiatan rapat-rapat dan risalah DPRD, penyerapan aspirasi DPRD dan dukungan perundang-undangan kepada DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Sekretariat DPRD untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya Lingkup Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (Reward and Punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Fasilitasi, Verifikasi, dan koordinasi pembahasan KUA PPAS/Perubahan KUA PPAS;
- e. Fasilitasi, Verifikasi, dan koordinasi pembahasan APBD/Perubahan APBD;
- f. Fasilitasi, Verifikasi, dan koordinasi pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. Fasilitasi, Verifikasi, dan koordinasi pembahasan laporan semester pertarna dan prognosis enarn berikutnya;
- h. Fasilitasi, Verifikasi, dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota;
- i. Fasilitasi, Verifikasi, dan koordinasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- j. Fasilitasi, Verifikasi, dan koordinasi aspirasi masyarakat;

- k. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- l. Fasilitasi, Verifikasi, dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- m. Fasilitasi, Verifikasi, dan koordinasi dukungan pengawasan pengguna anggaran;
- n. Fasilitasi, Verifikasi, dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- o. Fasilitasi, Verifikasi, dan koordinasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- p. Fasilitasi, Verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah;
- q. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- r. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- s. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris DPRD; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

#### **4. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan**

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program kegiatan rapat-rapat dan risalah DPRD, penyerapan aspirasi DPRD, dan dukungan perundang-undangan kepada DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Sekretariat DPRD untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatap, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya Li ngkup Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (Reward and Punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Bagian Persidangan dan Perundang-Unda9gan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan kajian perundang-u;ndangan;
- e. Fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- f. Fasilitasi penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD;

- g. Verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. Pengumpulan bahan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD;
- i. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
- j. Fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan/ atau rapat ;
- k. Penyusunan risalah rapat;
- l. Pengoordinasian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- m. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi Daftar Inventarisir Masalah (DIM);
- n. Verifikasi, koordinasi, dan evaluasi risalah rapat;
- o. Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- p. Penyelenggaraan publikasi;
- q. Penyelenggaraan keprotokolan;
- r. Penghimpunan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD;
- s. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- t. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- u. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris DPRD; dan
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

## 2.2 SUMBER DAYA

### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM per Bulan Oktober 2023 untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebanyak 49 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

a. Komposisi SDM berdasarkan fungsi jabatan, yaitu:

- Pejabat Struktural	:	6 orang
- Pejabat Fungsional Tertentu	:	6 orang
- Tenaga Fungsional Pelaksana	:	37 orang
Jumlah	:	49 orang

b. Komposisi SDM berdasarkan strata pendidikan, yaitu :

- Strata-III	:	1 orang
- Strata-II	:	12 orang
- Strata-I	:	26 orang
- D-4	:	1 orang
- D-3	:	3 orang
- D1	:	1 orang
- SLTA	:	4 orang
- SMP	:	1 orang
Jumlah	:	49 orang

c. Komposisi SDM berdasarkan Golongan, yaitu :

- Golongan IV	:	9 orang
- Golongan III	:	34 orang
- Golongan II	:	6 orang
- Golongan I	:	- orang

- Jumlah : 49 orang
- d. Komposisi SDM berdasarkan jenis kelamin, yaitu :
- Laki-laki : 20 orang
  - Perempuan : 29 orang
- Jumlah : 49 orang

Dari jumlah tersebut belum termasuk Pegawai Harian Lepas (PHL) sebanyak 132 orang yang turut serta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan.

Gambaran lebih jelas tentang SDM Sekretariat DPRD Kota Medan, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 SDM Sekretariat DPRD Kota Medan  
Berdasarkan Pangkat/ Golongan dan Pendidikan Tahun 2023

No.	Pangkat/Gol.	Pendidikan (orang)								Jumlah (orang)
		S3	S 2	S 1	D 4	D 3	SLTA	SLTF	SD	
1	Pembina Utama Muda / IV c									
2	Pembina Tk I/ IV b		2	2						4
3	Pembina / IV a	1	4							5
4	Penata Tk. I / III d		4	8						12
5	Penata / III c		1	11						12
6	Penata Muda Tk. I / III b		1	2		1	2			6
7	Penata Muda / III a			3	1					4

8	Pengatur Tk I / II d					2				2
9	Pengatur / II c						1			2
10	Pengatur Muda Tk. I / II b						1			1
11	Pengatur Muda / II a						1			1
12	Juru Tk I / I d									
13	Juru / I c									
14	Juru Muda Tk I / I b									
15	Juru Muda / I a									
16	PHL		2	64		10	50	1		132
	JUMLAH	1	14	90	1	13	55	1		181

Sumber : Subbag TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Medan (2023)

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan, jumlah SDM tersebut relatif sudah memadai. Namun demikian, dari sisi kualitas SDM Sekretariat DPRD Kota Medan masih memerlukan banyak peningkatan sehingga masih dibutuhkan peningkatan kapasitas bagi SDM Sekretariat DPRD Kota Medan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *coaching clinic*, *workshop*, dan pola peningkatan kapasitas lainnya.

SDM Sekretariat DPRD Kota Medan tersebut bertugas untuk memfasilitasi tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan sebanyak 50 orang. Adapun komposisi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan masa jabatan 2019-2024, sebagai berikut:

a. Komposisi DPRD Kota Medan berdasarkan fraksi, yaitu :

- Fraksi PDI Perjuangan	:	10	orang
- Fraksi Gerindra	:	10	orang
- Fraksi PKS	:	7	orang
- Fraksi PAN	:	6	orang
- Fraksi Golkar	:	4	orang
- Fraksi Demokrat	:	4	orang
- Fraksi Nasional Demokrat	:	4	orang
- Fraksi Hanura, PSI, PPP	:	5	orang
Jumlah	:	50	orang

b. Komposisi DPRD Kota Medan berdasarkan struktur jabatan, yaitu :

- Pimpinan DPRD	:	4	orang
- Anggota DPRD	:	46	orang
Jumlah	:	50	orang

c. Komposisi DPRD Kota Medan berdasarkan jenis kelamin, yaitu :

- Laki-laki	:	44	orang
- Perempuan	:	6	orang
Jumlah	:	50	orang

## 2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Kota Medan dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Kondisi dan komposisi sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kota Medan

No.	Jenis Perlengkapan	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah	m <sup>2</sup>	5.354	5.354	-	-
2	Gedung dan Bangunan	Unit	1	1	-	-
3	Ruang Kerja Pimpinan DPRD	Unit	4	4	-	-
4	Ruang Kerja Anggota DPRD	Unit	46	46	-	-
5	Ruang Rapat/Sidang	Unit	21	21	-	-
6	Ruang Pers	Unit	2	2	-	-
7	Ruang Transit Wali Kota	Unit	1	1	-	-
8	Ruang Menyusui	Unit	1	1	-	-
9	Ruang Podcast	Unit	1	1		
10	Ruang kantin	Unit	1	1		
11	Ruang Kerja Sekretaris DPRD	Unit	1	1	-	-
12	Ruang Kerja Kepala Bagian Sekretariat DPRD	Unit	4	4	-	-

13	Ruang Kerja Kepala Subbagian Sekretariat DPRD	Unit	12	12	-	-
14	Ruang Kerja Staf	Unit	39	39	-	-
15	Tempat Parkir Kendaraan	Lantai	3	3	-	-
16	Peralatan dan Mesin					
	a. Laptop	Unit	82	79	3	-
	b. Komputer	Unit	126	106	17	-
	c. Pendingin Udara (AC)	Unit	110	94	6	10
	d. Kulkas	Unit	16	9	7	-
	e. Lemari	Unit	153	131	19	3
	f. Filling Kabinet	Unit	157	117	40	-
	g. Meja	Unit	382	290	92	-
	h. Kursi	Unit	1238	742	496	-
	i. Printer	Unit	102	93	9	-
	j. Foto Copy	Unit	9	6	-	3
	k. Dispenser	Unit	82	71	11	-
	l. Televisi	<b>Unit</b>	91	81	10	-
	m. Tablet	<b>Unit</b>	64	64	-	-
17	Jaringan Internet	Mbps	130	130	-	-
18	Aset Tetap Lainnya					
	• Kendaraan roda 2	Unit	3	2	1	-

• Kendaraan roda 4	Unit	32	18	14	-
-----------------------	------	----	----	----	---

Sumber : Tim Kerja Lingkup Perlengkapan Sekretariat DPRD Kota Medan (2023).

Secara umum, sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kota Medan sudah relatif memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun demikian, perbaikan kualitas akan sarana dan prasarana harus terus ditingkatkan.

### 2.3 KINERJA PELAYANAN

Sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas memberikan pelayanan administratif dan dukungan kepada Anggota DPRD Kota Medan, maka sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Medan berhubungan dengan kepuasan anggota DPRD Kota Medan yang dilayani. Adapun tolok ukur kinerja pelayanan sekretariat adalah tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administratif dan dukungan fasilitatif Sekretariat DPRD Kota Medan.

Dalam periode Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2016-2021, tingkat kepuasan Anggota DPRD Kota Medan menunjukkan kepuasan yang relatif masih rendah. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan 2016-2021. Komplain atas pelayanan sekretariat DPRD Kota Medan sering diungkapkan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan Tahun 2016-2021. Hal ini bermakna bahwa Sekretariat DPRD Kota Medan, dalam kurun waktu 2016-2021 tersebut belum mampu memberikan pelayanan sesuai harapan dan kebutuhan Anggota DPRD Kota Medan.

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan 2016-2021

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan				-	-	2,5	2,6	2,7	-	-	2,87	2,67	2,72	-	-	1,16	1	-
2	Nilai Sekretariat DPRD Kota Medan oleh Inspektorat LKIP				C	C	C	B	B	-	-	C	C	B	-	-	1	0,9	1

Sumber : Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Medan (2021)

Namun demikian, diluar tingkat kepuasan anggota DPRD tersebut, Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026 secara faktual telah mampu memfasilitasi Anggota DPRD Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Atas fasilitasi Sekretariat DPRD Kota Medan tersebut, selanjutnya DPRD Kota Medan 2021-2026 telah menghasilkan beberapa produk sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4. Produk DPRD Kota Medan 2021-2026

Tahun	Produk Hukum	Uraian
2016	Peraturan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;</li> <li>2. Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;</li> <li>3. Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;</li> <li>4. Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan;</li> <li>5. Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;</li> <li>6. Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;</li> <li>7. Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;</li> <li>8. Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan</li> </ol>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;</p> <p>9. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>10. Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;</p> <p>11. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;</p> <p>12. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;</p> <p>13. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;</p> <p>14. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan</p> <p>15. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.</p>
	SK DPRD	<p>1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Komposisi Personalia Anggota Badan</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2015-2016;</p> <p>2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;</p> <p>3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;</p> <p>4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Terhadap Usul Inisiatif Anggota DPRD Kota Medan Menjadi Inisiatif DPRD Kota Medan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kelapa Lingkungan;</p> <p>5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah 2016;</p> <p>6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Kota Medan Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Tahun 2016;</p> <p>7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Tahun 2016;</p> <p>8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2015-2016;</p> <p>9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;</p> <p>10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Daerah Kota Medan Tentang Pengelolaan Limbah Rumah Tangga;</p> <p>11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;</p> <p>12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Terhadap Usul Inisiatif Anggota DPRD Kota Medan Menjadi Inisiatif DPRD Kota Medan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis;</p> <p>13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Terhadap Usul Inisiatif Anggota DPRD Kota Medan Menjadi Inisiatif DPRD Kota Medan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Limbah Rumah Tangga;</p> <p>14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Laporan</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;</p> <p>15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2015;</p> <p>16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2015;</p> <p>17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengelolaan Limbah Rumah Tangga;</p> <p>18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Terhadap Laporan</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2015;</p> <p>19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir;</p> <p>20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Ranperda Kota Medan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir;</p> <p>21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Izin Usaha Konstruksi;</p> <p>22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;</p> <p>23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Perstujuan Rancangan peraturan Daerah Kota</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Medan Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Pada Perseroan Terbatas Kawasan Industri Medan (Persero);</p> <p>25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;</p> <p>26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Pada Perseroan Terbatas Kawasan Industri Medan (Persero);</p> <p>28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Kebijakan Umum, Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021;</p> <p>29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;</p> <p>30. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;</p> <p>31. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2020;</p> <p>32. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2020;</p> <p>33. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;</p> <p>34. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>35. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;</p> <p>36. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Daerah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;</p> <p>37. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021;</p> <p>38. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021;</p> <p>39. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis;</p> <p>40. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;</p> <p>41. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2016;</p> <p>42. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Medan;</p> <p>43. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Medan Tentang Pengelolaan Air Limbah Domesik;</p> <p>44. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;</p> <p>45. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Komposisi Personalia Komis-Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2016-2017;</p> <p>46. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Personalia Komisi-Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2016-2017;</p> <p>47. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Medan Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;</p> <p>48. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;</p> <p>49. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Hasil Penyempurnaan Terhadap Evaluasi Gubernur Provinsi Sumatera Utara Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Medan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2016;</p> <p>50. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Medan;</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>51. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Medan;</p> <p>52. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2017;</p> <p>53. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang APBD Tahun Anggaran 2017;</p> <p>54. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Medan.</p>
2017	Peraturan Daerah	1. Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir;

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="760 409 1417 551">2. Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;</li> <li data-bbox="760 577 1417 719">3. Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;</li> <li data-bbox="760 745 1417 887">4. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2017;</li> <li data-bbox="760 913 1417 1016">5. Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;</li> <li data-bbox="760 1043 1417 1238">6. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;</li> <li data-bbox="760 1265 1417 1460">7. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Pada Perseroan Terbatas Kawasan Industri Medan (Persero);</li> <li data-bbox="760 1487 1417 1682">8. Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;</li> </ol>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>9. Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;</p> <p>10. Peraturan Daerah tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis;</p> <p>11. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; dan</p> <p>12. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.</p>
	SK DPRD	<p>1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Kemitraan Perusahaan Dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;</p> <p>2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Daerah Kota medan Tentang Kemitraan Perusahaan Dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;</p> <p>3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Hasil Penyempurnaan Terhadap Evaluasi Gubernur Provinsi Sumatera Utara Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan;</p> <p>4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Izin dan Pelayanan Di Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan;</p> <p>5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota medan Tentang Izin Dan Pelayanan Di Bidang Sosial dan KetenagaKerjaan;</p> <p>6. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Pekerjaan (PPHP) Pada Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2017;</p> <p>7. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2017;</p> <p>8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyetaraan Modal Pemerintah Kota Medan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;</p> <p>9. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dan Walikota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kota Medan;</p> <p>10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 22017-2018;</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2017-2018;</p> <p>12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017;</p> <p>13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Pada Perseroan Terbatas Kawasan Industri Medan (Persero);</p> <p>14. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan Walikota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Pada Perseroan Terbatas Kawasan Industri Medan (PERSERO);</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;</p> <p>16. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan Walikota Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Lingkungan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;</p> <p>17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2016;</p> <p>18. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kota Medan Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2016;</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;</p> <p>20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;</p> <p>21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Data Penduduk Miskin dan Penerima Bantuan Iuran Kota Medan;</p> <p>22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Data Penduduk Miskin dan Penerima Bantuan Iuran di Kota Medan;</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;</p> <p>24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;</p> <p>25. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan Walikota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;</p> <p>26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Medan Tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis;</p> <p>27. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan Walikota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis;</p> <p>28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penanggulangan Bencana;</p> <p>29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penanggulangan Bencana;</p> <p>30. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Daerah Kota Medan tentang Izin Lingkungan;</p> <p>31. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Izin Lingkungan;</p> <p>32. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;</p> <p>33. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;</p> <p>34. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;</p> <p>35. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;</p> <p>36. Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan Walikota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;</p> <p>37. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Kemitraan Perusahaan Dalam Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan;</p> <p>38. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Anggaran</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;</p> <p>39. Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota Medan dan DPRD Kota Medan Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;</p> <p>40. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2017;</p> <p>41. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2017;</p> <p>42. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Program Alat - Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan Masa Kerja Tahun 2018;</p> <p>43. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Komisi-Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2017-2018;</p> <p>44. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;</p> <p>45. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Hasil Penyempurnaan Terhadap Evaluasi Gubernur Provinsi Sumatera Utara Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Medan Tentang</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2017;</p> <p>46. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Komposisi Personalia Komisi - Komisi Badan Musyawarah, Badan Anggaran, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2017- 2018;</p> <p>47. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;</p> <p>48. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>49. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penanggulangan Bencana;</p> <p>50. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan Walikota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penanggulangan Bencana;</p> <p>51. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2018.</p>
<b>2018</b>	Peraturan Daerah	<p>1. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;</p> <p>2. Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;</p> <p>3. Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapat</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;</p> <p>4. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.</p>
	Peraturan DPRD	Peraturan DPRD Kota Medan tentang Peraturan Tata Tertib.
	SK DPRD	<p>1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;</p> <p>2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Badan Musyawarah dan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2017-2018;</p> <p>3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2017;</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Kompisisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2017;</p> <p>5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2017;</p> <p>6. Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan dan Wali Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;</p> <p>7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Badan Musyawarah dan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2017-2018;</p> <p>9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;</p> <p>10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;</p> <p>11. Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan dan Walikota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;</p> <p>12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;</p> <p>13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;</p> <p>14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalial Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2018-2019;</p> <p>15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Di Lingkungan DPRD Kota Medan;</p> <p>16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;</p> <p>17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019;</p> <p>18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;</p> <p>19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kota Medan Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;</p> <p>20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Anggaran</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019;</p> <p>21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019;</p> <p>22. Persetujuan Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan DPRD Kota Medan Tentang Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1330/KPTS/2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Dearah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Medan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;</p> <p>23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perubahan peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2021;</p> <p>24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019;</p> <p>25. Persetujuan Bersama Walikota Medan dan DPRD Kota Medan Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang APBD Tahun Anggaran 2019;</p> <p>26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;</p> <p>27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Penetapan Komposisi Personalia Komisi</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan Tahun 2018-2019;</p> <p>28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021;</p> <p>29. Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan dan Walikota Medan Tentang Persetujuan Bersama Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021;</p> <p>30. Persetujuan Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan DPRD Kota Medan Tentang Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1330/KPTS/2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Dan</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		Rancangan Peraturan Walikota Medan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
<b>2019</b>	Peraturan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Restribusi Izin Usaha Rekaman;</li> <li>2. Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang RPJMD Tahun 2016-2021;</li> <li>3. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;</li> <li>4. Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;</li> <li>5. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;</li> <li>6. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;</li> </ol>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>7. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;</p> <p>8. Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan.</p>
	SK DPRD	<p>1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016 – 2021;</p> <p>2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan;</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Medan;</p> <p>4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan;</p> <p>5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan;</p> <p>6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan;</p> <p>7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan;</p> <p>8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan;</p> <p>9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan Tahun 2019;</p> <p>10. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2019;</p> <p>11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang persetujuan rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2019;</p> <p>12. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan Walikota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;</p> <p>13. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dan Walikota Medan Tentang Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;</p> <p>14. Konsep Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Terhadap Ranperda Usul Inisiatif Anggota DPRD Kota Medan</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Menjadi Inisiatif DPRD Kota Medan tentang Larangan Penggusuran Rumah Penduduk Tanpa Penyediaan Rumah Pengganti Kota Medan Tahun 2019;</p> <p>15. Konsep Keputusan DPRD Kota Medan Tentang Persetujuan Terhadap Ranperda Usul Inisiatif Anggota DPRD Kota Medan Menjadi Inisiatif DPRD Kota Medan Tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Di Wilayah Kota Medan Tahun 2019;</p> <p>16. Konsep Keputusan DPRD Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Medan;</p> <p>17. Konsep Keputusan DPRD Kota Medan Tentang Persetujuan Terhadap Ranperda Usul Inisiatif Anggota DPRD Kota Medan Menjadi Inisiatif DPRD Kota Medan Tentang Perlindungan Pedagang Kecil di Kota Medan Tahun 2019;</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>18. Berita Acara Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Medan dengan DPRD Kota Medan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/97/KPTS/2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;</p> <p>19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan;</p> <p>20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Data Penduduk Miskin dan Penerima Bantuan Iuran di Kota Medan;</p> <p>21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Izin Lingkungan;</p> <p>22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Komisi - Komisi dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2018 – 2019;</p> <p>23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;</p> <p>24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Medan.</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
2020	Peraturan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;</li> <li>2. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;</li> <li>3. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.</li> </ol>
	Peraturan DPRD	Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Tata Tertib
	SK DPRD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peraturan Tata Tertib;</li> <li>2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Medan Masa Jabatan 2019-2024 Periode Ke 1;</li> </ol>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pinjaman Daerah;</p> <p>4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pinjaman Daerah;</p> <p>5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;</p> <p>6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;</p> <p>7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;</p> <p>8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;</p> <p>9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;</p> <p>10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Pembahasan Rancangan</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;</p> <p>11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Medan Tahun 2020;</p> <p>12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019;</p> <p>13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019;</p> <p>14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Rekomendasi DPRD Kota Medan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2019;</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Personalia Panitia Khusus Penanganan Pencegahan dan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Kota Medan;</p> <p>16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Komposisi Personalia Panitia Khusus Penanganan Pencegahan dan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Kota Medan;</p> <p>17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;</p> <p>18. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dan Walikota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;</p> <p>19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Perubahan</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Penetapan Komposisi Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan Periode Ke 1 Masa Jabatan 2019-2024;</p> <p>20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pinjaman Daerah;</p> <p>21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;</p> <p>22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2020;</p> <p>23. Persetujuan Wali Kota Medan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2020;</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Program Kerja DPRD Kota Medan Tahun 2021;</p> <p>25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021;</p> <p>26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Hasil Evaluasi Gubernur Provinsi Sumatera Utara Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Walikota Medan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;</p> <p>27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan;</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Medan;</p> <p>29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2020;</p> <p>30. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dan Walikota Medan Tentang Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2020.</p>
<b>2021</b>	Peraturan Daerah	<p>1. Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Kearsipan</p> <p>2. Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pinjaman Daerah</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		3. Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
	SK DPRD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Usul Pengangkatan Ir. Akhyar Nasution, M. Si. (Wakil Wali Kota Medan) Menjadi Wali Kota Medan dan Sekaligus Memberhentikan Ir. Akhyar Nasution, M.Si. Sebagai Wakil Wali Kota Medan Sisa Masa Jabatan 2016 – 2021;</li> <li>2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Usul Pemberhentian Ir. Akhyar Nasution, M. Si. Sebagai Wali Kota Medan Sisa Masa Jabatan 2016 – 2021;</li> <li>3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Usul Pengesahan Pengangkatan Muhammad Bobby Afif Nasution, M. Si. Sebagai Wali Kota Medan dan H. Aulia Rachman Sebagai Wakil Wali Kota Medan Periode 2021 – 2024;</li> <li>4. Kesepakatan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan Tentang</li> </ol>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021;</p> <p>5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2020;</p> <p>6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2020;</p> <p>7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Rekomendasi DPRD Kota Medan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020;</p> <p>8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan di Kota Medan;</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;</p> <p>10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;</p> <p>11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2020;</p> <p>12. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan Wali Kota Medan Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2020;</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 – 2031;</p> <p>14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 -2026;</p> <p>15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 -2026;</p> <p>16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Medan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 -2026;</p> <p>17. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Medan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD TA. 2021;</p> <p>18. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Medan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan TA. 2021;</p> <p>19. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Medan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 2022;</p> <p>20. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Medan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Kebijakan Umum APBD TA. 2022.</p>

Sumber: Tim Kerja Lingkup Kajian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD (2023)

Dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap kinerja DPRD Kota Medan Tahun 2016-2021 dengan demikian pada dasarnya sudah cukup baik. Kualitas dukungan tersebut akan terus ditingkatkan, sehingga capaian kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan akan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan juga dapat dikenali dari serapan anggaran yang dikelola Sekretariat DPRD Kota Medan selama periode Renstra 2016-2021. Serapan anggaran tersebut adalah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan 2016-2021, berikut:

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan 2016-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA	102.015.640.070,00	136.423.120.000,00	182.362.680.110,00	210.956.488.098,00	154.462.905.370,00	75.768.431.429,00	112.587.292.819,00	163.924.723.896,62	162.770.065.436,03	129.765.808.350,00	0,74	0,83	0,90	0,77	0,84	28%	31%
BELANJA OPERASI	94.502.348.220,00	127.634.700.000,00	177.765.693.850,00	207.216.179.954,00	149.988.496.040,00	70.274.922.501,00	104.742.969.369,00	160.039.029.721,62	159.797.406.516,03	126.575.798.985,00	0,74	0,82	0,90	0,77	0,84	30%	33%
Belanja Pegawai	6.598.153.000,00	11.609.268.000,00	48.140.754.000,00	49.969.326.000,00	50.969.326.000,00	9.219.167.420,00	10.441.900.806,00	47.378.656.153,00	42.471.618.292,00	40.142.897.359,00	1,40	0,90	0,98	0,85	0,79	131%	118%
Belanja Barang dan Jasa	87.904.195.220,00	116.025.432.000,00	129.624.939.850,00	157.246.853.954,00	99.019.170.040,00	61.055.755.081,00	94.301.068.563,00	112.660.373.568,62	117.325.788.224,03	86.432.901.626,00	0,69	0,81	0,87	0,9	0,87	21%	26%
BELANJA MODAL	7.513.291.850,00	8.788.420.000,00	4.596.986.260,00	3.740.308.144,00	4.474.409.330,00	5.493.508.928,00	7.844.323.450,00	3.885.694.175,00	2.972.658.920,00	3.190.009.365,00	0,73	0,89	0,85	0,79	0,71	-6%	-10%

Perubahan Rencana Strategis 2021-2026

Belanja Peralatan dan Mesin	7.413.29	6.622.20	4.503.02	3.740.30	4.459.40	5.413.4	6.004.82	3.791.73	2.972.65	3.175.15	0,73	0,91	0,84	0,79	0,71	-10%	-15%
	1.850,00	0.000,00	6.260,00	8.144,00	9.330,00	84.609,00	7.100,00	4.175,00	8.920,00	3.365,00							
Belanja Bangunan dan Gedung		1.588.10			15.000.0		1.403.06			14.856.0		0,88			0,99		
		0.000,00			00,00		0.000,00			00,00							
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		224.000.					182.095.					0,81					
		000,00					850,00										
Belanja Aset Tetap Lainnya	100.000.	354.120.	93.960.0			80.024.	254.340.	93.960.0			0,80	0,72	1,00			27%	18%
	000,00	000,00	00,00			319,00	500,00	00,00									

Sumber : PPK SKPD Sekretariat DPRD Kota Medan (2021)

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN**

### **1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk kurun waktu 2021-2026, Sekretariat DPRD Kota Medan juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang ini bersumber dari lingkungan eksternal Sekretariat DPRD Kota Medan, dan sangat mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tantangan perlu diidentifikasi, karena dapat berdampak buruk bagi kinerja sekretariat DPRD Kota Medan jika tidak direspon dengan memadai. Sementara peluang harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar Sekretariat DPRD Kota Medan nantinya dapat menghasilkan kinerja yang unggul dan memuaskan Anggota DPRD Kota Medan.

Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Medan berasal dari berbagai sumber eksternal. Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka sumber tantangan dan peluang Sekretariat DPRD Kota Medan adalah: (1) RTRW Kota Medan dan (2) KLHS Kota Medan. Adapun Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2021-2026 dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 tidak digunakan sebagai rujukan, karena masing-masing institusi berdiri sendiri-sendiri. Tantangan dan peluang Sekretariat DPRD Kota Medan antara lain adalah sebagai berikut:

#### **a. Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)***

Wabah *Covid-19* di Kota Medan terjadi sejak triwulan pertama Tahun 2020. Sampai dengan awal Tahun 2021, wabah ini belum

menunjukkan akan berakhir. Dampak yang ditimbulkan oleh *Covid-19* ini cukup besar bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Medan. Hampir semua sektor mengalami penurunan kinerja. Selain itu, APBD Kota Medan Tahun 2020 juga mengalami penurunan hingga 40% serta banyak program pembangunan yang sudah direncanakan menjadi batal.

b. Kebijakan Efisiensi Anggaran oleh Pemerintah

Pandemi *Covid-19*, selain mengurangi APBD Kota Medan juga berdampak pada kebijakan anggaran Kota Medan. Mengikuti kebijakan pemerintah pusat, maka 50% anggaran pembangunan Kota Medan diarahkan untuk menangani dampak *Covid-19*. Efisiensi anggaran dilakukan pada hampir diseluruh sektor pembangunan, termasuk Sekretariat DPRD Kota Medan. Hal ini berdampak berkurangnya sumber daya untuk penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan kepada DPRD Kota Medan.

c. Tuntutan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan di tahun politik.

Tahun 2024 adalah tahun politik, karena Kota Medan menyelenggarakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung. Pada Tahun 2024, anggota DPRD cukup intensif menemui konstituennya dan mengarahkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Anggota Legislatif di tingkat Pusat sampai Daerah Kabupaten Kota. Hal ini selain memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar juga meningkatkan secara signifikan dukungan administratif Sekretariat DPRD Kota Medan.

Sementara itu, dalam situasi tersebut beban kerja SDM Pada Sekretariat DPRD Kota Medan semakin meningkat.

- d. Pemahaman yang tidak merata anggota DPRD Kota Medan tentang sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah dan cara kerja dari sistem tersebut.

Ketidakhahaman beberapa Anggota DPRD Kota Medan akan sistem perencanaan dan penganggaran sering berakibat kekecewaan Anggota DPRD Kota Medan yang menduga sistem perencanaan dan penganggaran tidak sejalan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD. Bahkan, lebih jauh mereka dapat berasumsi bahwa masalah tersebut terletak pada sekretariat DPRD yang tidak mampu memfasilitasi dan memadukan sistem perencanaan dan penganggaran dengan kebutuhan kerja DPRD. Sebagai contoh, dalam rangka peningkatan demokratisasi pemerintahan, terkadang muncul aspirasi dari anggota masyarakat yang pelaksanaannya berpotensi menggunakan anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan. Dalam kondisi demikian, maka Sekretariat DPRD dihadapkan pada dua pilihan, menolak atau menerima aspirasi yang secara substantif diperlukan bagi demokratisasi, akan tetapi di sisi lain bertentangan dengan prinsip pengelolaan anggaran yang berlaku.

## **2. Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan**

Sementara itu, peluang yang diberikan oleh lingkungan strategis terhadap Sekretariat DPRD Kota Medan antara lain berupa:

a. Dukungan DPRD terhadap anggaran Sekretariat DPRD

Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Medan. Dengan tugas dan fungsi tersebut, maka DPRD sangat mendukung seluruh kegiatan yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan. Dukungan tersebut terwujud dalam bentuk persetujuan anggaran yang diajukan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan.

b. Kemajuan IT yang sangat mendukung untuk kemudahan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD Kota Medan.

Kegiatan sidang, rapat atau kunjungan kerja Anggota DPRD Kota Medan akan mudah direncanakan, dikoordinasikan dan difasilitasi penyelenggaraannya jika didukung oleh sistem informasi berbasis IT yang handal. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Kota Medan harus dapat merespon kemajuan IT ini dengan sangat baik.

c. Komitmen yang tinggi dari pemerintah dan lembaga pengawas keuangan terhadap penggunaan anggaran secara disiplin.

Komitmen ini sangat diperlukan agar Sekretariat DPRD Kota Medan mampu menghindari penggunaan anggaran yang tidak semestinya, dan lebih fokus untuk tujuan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Anggota DPRD Kota Medan.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN**

**3.1 PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN**

Berikut adalah beberapa permasalahan yang ditemukan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan dalam proses penyelenggaraan pelayanan fasilitasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan. Permasalahan tersebut perlu dikenali dengan baik, karena bisa menjadi penghambat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan.

Tabel 3.1. Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepuasan Pelanggan	Tingkat kepuasan anggota DPRD pada angka 3.013	Nilai IKM=3.16	Kompetensi ASN Sekretariat DPRD Kota Medan	Ekspektasi yang sangat tinggi dari Anggota DPRD	Masih rendahnya tingkat kepuasan anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan
			Kualitas koordinasi kerja	Kemajuan IT yang sangat mendukung	

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Sekretariat DPRD Kota Medan dengan Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan masih rendah	untuk kemudahan pelayanan administratif kepada anggota DPRD Kota Medan	administratif dan dukungan fasilitatif yang diberikan sekretariat DPRD Kota Medan
Sumber daya Manusia	Kinerja ASN Sekretariat belum optimal	Rata-rata Kinerja ASN Sekretariat DPRD harus minimal Baik	Disiplin kerja ASN Sekretariat DPRD Kota Medan masih rendah	Kurangnya peluang untuk beasiswa	Rendahnya kinerja tahunan ASN Sekretariat DPRD Kota Medan
Tatalaksana			Kompetensi ASN Sekretariat DPRD Kota Medan masih kurang memadai untuk penyelenggara		Kurangnya pemanfaatan Inovasi yang sudah ada

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			raan tugas dan fungsi instansi		
			Tingkat komitmen ASN Sekretariat DPRD Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya		Pelaksanaan RB belum maksimal
Monitoring dan evaluasi			Tersedia struktur organisasi dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas		Maturitas SPIP masih rendah
Kinerja organisasi			Jumlah aparatur Sekretariat DPRD Kota Medan memadai		Nilai SAKIP masih bisa di tingkatkan

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laporan keuangan			Anggaran tersedia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi	Dukungan DPRD terhadap anggaran Sekretariat DPRD	Masih perlu peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran

### 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi Pembangunan Kota Medan untuk periode lima tahun (2021-2026) adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif”**.

Substansi dari Visi tersebut adalah bahwa dalam rentang waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, masyarakat Kota Medan akan mengalami perubahan. Perubahan dimaksud adalah perubahan karakter masyarakat Kota Medan kembali kepada jati diri dengan karakter saudagar, yang meskipun keras tetapi menjunjung gotong royong dan membantu sesama. Dengan karakter tersebut Kota Medan akan menjadi *new* Medan yang beridentitas dan memiliki *image* lebih baik, kota yang memberikan keberkahan kepada masyarakatnya, maju dalam penerapan teknologi dan kondusif untuk ditinggali warganya.

Adapun Misi Kota Medan, meliputi:

1. Medan Berkah

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Medan Maju

Memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua.

3. Medan Bersih

Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

4. Medan Membangun

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM.

5. Medan Kondusif

Menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

6. Medan Inovatif

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital*, teknologi digital dan sosial budaya.

7. Medan Beridentitas

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis, toleran dalam kemajemukan, demokratis dan cinta tanah air.

Dari ketujuh Misi Wali Kota/Wakil Wali Kota Medan tersebut, terdapat misi yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan. Misi dimaksud adalah misi ketiga, yaitu **Medan Bersih**. Secara lebih spesifik, keterkaitan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan dengan Misi Medan Bersih adalah pada tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Smart*, Bersih, dan Akuntabel”.

Sebagai bagian dari perangkat daerah di Kota Medan, Sekretariat DPRD Kota Medan juga harus berperan aktif dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang berorientasi pada pemberian pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan, maka keseluruhan aktivitas Sekretariat DPRD sangat penting bagi perwujudan Visi, Misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, khususnya Misi Medan Bersih tersebut.

Adapun permasalahan yang potensial berkembang dalam pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan terkait Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih adalah sebagai ditunjukkan dalam Tabel 3.2. berikut.

Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan Berdasarkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif</b>				
No.	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Medan Bersih	Masih perlu peningkatan akuntabilitas pelayanan administratif dan dukungan fasilitatif Sekretariat DPRD Kota Medan	SAKIP belum diterapkan secara optimal pada Sekretariat DPRD Kota Medan	
		Masih rendahnya kepuasan DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administratif dan dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Medan	Intensitas Kebutuhan layanan yang sangat tinggi dan dinamis	Komitmen pimpinan dalam peningkatan kinerja

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA**

Dalam rangka analisis permasalahan, perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota seharusnya juga melakukan telaahan atas Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi relevan. Hal ini sangat penting dalam rangka perangkat daerah kabupaten/kota mengidentifikasi isu-isu strategis, khususnya yang bersumber dari kedua lembaga tersebut.

Adapun Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi relevan dengan Sekretariat DPRD Kota Medan adalah Sekretariat Jenderal DPR RI di tingkat kementerian/Lembaga dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tingkat Provinsi. Namun demikian, ketiga lembaga tersebut tidak memiliki hubungan hierarkis, masing-masing berdiri sendiri, sehingga kinerja satu lembaga tidak secara langsung mempengaruhi kinerja lembaga yang lain.

Berdasarkan posisi kelembagaan yang demikian tersebut, maka muatan sasaran jangka menengah dalam Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara tidak relevan dengan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan. Oleh karena itu, telaahan atas Renstra kedua lembaga tersebut tidak dilakukan dalam tahap analisis isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Medan.

### **3.4 TELAAH RTRW DAN KLHS**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Medan merupakan dua dokumen yang sangat penting menjadi rujukan bagi perangkat daerah di Kota Medan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah. RTRW berhubungan dengan perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang. Adapun KLHS

digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

Dalam penyusunan Renstra, Sekretariat DPRD Kota Medan juga melakukan telaahan atas RTRW dan KLHS Kota Medan. Namun karena tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang hanya berfokus pada pemberian layanan fasilitasi kepada Anggota DPRD Kota Medan, maka tidak terdapat isu signifikan bagi Sekretariat DPRD Kota Medan terkait dokumen RTRW dan KLHS tersebut.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis adalah berbagai hal dalam lingkungan internal dan eksternal Sekretariat DPRD Kota Medan yang harus direspon dengan baik oleh Sekretariat DPRD Kota Medan agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan baik. Identifikasi atas isu-isu strategis pada mulanya menghasilkan banyak isu yang berada dalam lingkup tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan. Namun demikian, agar Sekretariat DPRD lebih efektif dalam pengarahannya sumber daya yang dimilikinya, selanjutnya dilakukan pemilihan kembali atas berbagai isu tersebut sehingga diperoleh isu-isu yang benar-benar strategis.

Dalam proses penentuan isu strategis digunakan tiga kriteria, yaitu relevansi, dampak yang ditimbulkan, dan dukungan anggaran, dengan penjelasan sebagai berikut.

#### **1. Relevansi**

Mengukur isu berdasarkan tingkat kesesuaian isu tersebut terhadap tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan.

2. Dampak yang ditimbulkan

Kriteria ini digunakan untuk menetapkan tingkat kemanfaatan yang diperoleh jika isu tersebut direspon. Kriteria ini juga dapat dilihat dari tingkat kerugian yang ditimbulkan, jika isu tersebut tidak direspon dengan baik.

3. Dukungan anggaran

Digunakan untuk menentukan nilai anggaran yang diperlukan untuk merespon isu tersebut.

Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, selanjutnya dihasilkan isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Medan, meliputi:

1. Masih rendahnya akuntabilitas pelayanan administratif dan dukungan fasilitatif Sekretariat DPRD Kota Medan, yang dicirikan dengan nilai SAKIP Sekretariat Kota Medan oleh Inspektorat Kota Medan Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan oleh Inspektorat Kota Medan tahun 2022 adalah 70.45. Meskipun nilai tersebut sudah masuk kualifikasi BB, akan tetapi masih pada batas minimal pada rentang kualifikasi BB tersebut. Sekretariat DPRD Kota Medan harus selalu berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya pada tahun-tahun mendatang.
2. Masih rendahnya tingkat kepuasan DPRD Kota Medan atas pelayanan administratif dan dukungan fasilitatif yang diberikan Sekretariat DPRD Kota Medan.

Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan pada Tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 3.013 dari target 2,7 dengan skala 4. Namun demikian, capaian dari skala 4 tersebut masih menunjukkan tingkat kepuasan yang relatif masih rendah, yaitu masih menunjukkan predikat kinerja “kurang baik”.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan didefinisikan sebagai hasil yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode Renstra. Tujuan yang dirumuskan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan dalam dokumen Renstra ini, telah merujuk pada Tujuan dan Sasaran dalam perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Adapun tujuan Sekretariat DPRD Kota Medan untuk perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2026, yaitu **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan”**.

Selanjutnya, dalam rangka mengetahui efektivitas dan progres pencapaian tujuan dimaksud, maka ditetapkan suatu indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut bersifat proksi, akan tetapi diharapkan dapat mengungkapkan secara baik tingkat pencapaian tujuan. Adapun indikator yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut adalah Nilai SAKIP.

Tujuan tersebut meskipun relatif lebih operasional daripada visi organisasi, namun untuk menjadikannya lebih mudah diwujudkan selanjutnya dirumuskan sejumlah sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Medan. Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Medan yang diturunkan dari tujuan tersebut ada tiga sasaran yang meliputi:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan;
2. Meningkatnya Kepuasan DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan.

Masing-masing sasaran tersebut memiliki indikator yang akan digunakan untuk mengukur kinerja organisasi setiap tahun. Sasaran dan

indikator Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 4.1 berikut (Tabel T-C 25 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Administratif dan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan	68 (B)	70.45 (BB)	72 (BB)	74 (BB)	77 (BB)	81 (A)
			Meningkatnya Kepuasan DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	2,80 (C)	3.013 (C)	3.144 (B)	3.15 (B)	3.16 (B)	3.16 (B)

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dalam Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026 ini dapat dimaknai sebagai cara yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Perubahan Renstra ini. Sebagai suatu cara, maka dalam strategi tergambar program dan kegiatan yang akan dilakukan Sekretariat DPRD Kota Medan untuk rentang waktu Tahun 2021-2026, dalam upayanya memberikan pelayanan administratif dan dukungan fasilitatif kepada DPRD Kota Medan.

Strategi Sekretariat DPRD Kota Medan dirumuskan dengan menggunakan teknik analisis SWOT atau TOWS. Adapun prosedur dengan teknik SWOT ini meliputi sejumlah tahap, yaitu:

1. Identifikasi berbagai faktor dalam lingkungan strategis Sekretariat DPRD Kota Medan yang sangat berpotensi memberikan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026. Faktor-faktor tersebut dapat berada dalam lingkungan eksternal maupun internal Sekretariat DPRD Kota Medan. Faktor-faktor yang berada dalam lingkungan eksternal Sekretariat DPRD Kota Medan dapat diklasifikasikan dalam peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Treats*). Sedangkan faktor-faktor yang berasal dari internal Sekretariat DPRD Kota Medan, dapat diklasifikasikan ke dalam kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*).
2. Analisis faktor-faktor Internal Sekretariat DPRD Kota Medan. Analisis ini dimaksudkan untuk mendapatkan nilai akhir yang menggambarkan kondisi faktor internal. Proses analisis menggunakan alat bantu yang disebut dengan matriks *Internal Factors Analysis Summery (IFAS)*.

3. Analisis faktor-faktor eksternal Sekretariat DPRD Kota Medan. Prosedur analisis faktor-faktor eksternal relatif sama dengan prosedur untuk analisis faktor-faktor internal. Matriks yang digunakan sebagai alat bantu disebut dengan Matriks *External Factors Analysis Summery* (EFAS).
4. Analisis posisi strategis Sekretariat DPRD Kota Medan. Hasil dari analisis faktor lingkungan strategis dengan menggunakan matriks IFAS dan matriks EFAS adalah nilai faktor eksternal dan nilai faktor internal. Kedua nilai tersebut membentuk koordinat yang mencerminkan posisi strategis Sekretariat DPRD Kota Medan dalam kuadran analisis SWOT.
5. Perumusan strategi Sekretariat DPRD Kota Medan

Pada bagian ini kemudian dijelaskan proses analisis *SWOT*, sebelum menguraikan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Medan.

## 1. Analisis SWOT

### a. Analisis faktor-faktor internal Sekretariat DPRD Kota Medan.

Analisis faktor-faktor internal dilakukan dengan menggunakan matriks *IFAS*, sebagai berikut:

Tabel 5.1. Analisis faktor-faktor internal Sekretariat DPRD Kota Medan

No.	Faktor	Bobot	Rating	Nilai
<b>Kekuatan</b>				
1	Jumlah aparatur Sekretariat DPRD Kota Medan memadai	0.02	3	0.06
2	Anggaran tersedia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi	0.16	4	0.64

No.	Faktor	Bobot	Rating	Nilai
3	Sarana dan prasarana sangat memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi	0.04	3	0.12
4	Tersedia struktur organisasi dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas	0.13	3	0.39
Total nilai kekuatan				1.21
<b>Kelemahan</b>				
1	Pemenuhan 20 JP	0.20	1	0.20
2	Koordinasi internal Sekretariat DPRD Kota Medan	0.09	1	0.09
3	Kualitas koordinasi kerja Sekretariat DPRD Kota Medan dengan Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan masih rendah	0.11	1	0.11
4	Penerapan Reformasi Birokrasi belum Optimal	0.02	2	0.04
5	Tingkat komitmen ASN Sekretariat DPRD Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya	0.16	2	0.32
6	Maturitas SPIP masih rendah	0.07	2	0.14
Total nilai kelemahan				0.90
<b>Nilai faktor internal</b>		1		2.11

Nilai faktor-faktor internal adalah 2.11. Nilai ini lebih kecil daripada 2.5. Dengan nilai tersebut dapat dinyatakan bahwa berdasarkan faktor internal, Sekretariat DPRD Kota Medan dalam posisi lemah.

**b. Analisis faktor-faktor eksternal Sekretariat DPRD Kota Medan**

Hasil analisis faktor-faktor eksternal adalah sebagaimana ditunjukkan dalam matriks *EFAS* berikut:

Tabel 5.2. Analisis faktor-faktor eksternal Sekretariat DPRD Kota Medan

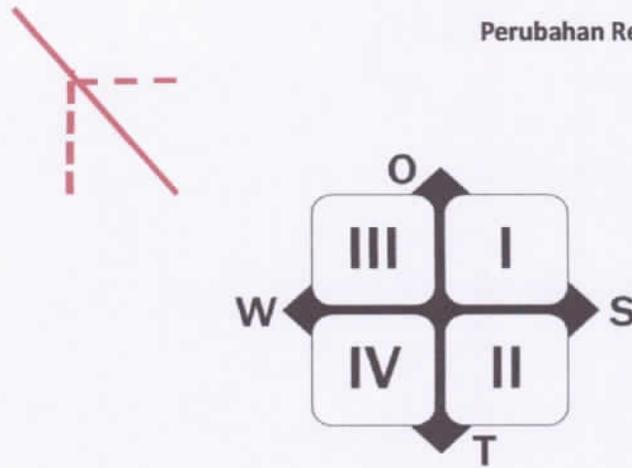
No	Faktor	Bobot	Rating	Nilai
<b>Peluang</b>				
1	Dukungan DPRD terhadap anggaran Sekretariat DPRD	0.29	4	1.16
2	Kemajuan IT yang sangat mendukung untuk kemudahan pelayanan administratif kepada anggota DPRD Kota Medan	0.05	3	0.15
3	Komitmen yang tinggi dari pemerintah dan lembaga pengawas keuangan terhadap penggunaan anggaran secara disiplin	0.24	4	0.96
Total nilai peluang				2.27
<b>Tantangan</b>				
1	Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat	0.10	2	0.20

2	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administratif dan dukungan Sekretariat DPRD	0.19	1	0.19
3	Pemahaman yang tidak merata anggota DPRD Kota Medan tentang sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah dan cara kerja dari sistem tersebut	0.10	1	0.10
4	Stigma negatif sejumlah LSM terhadap kinerja Sekretariat DPRD	0.05	2	0.10
Total nilai tantangan				0.59
<b>Nilai faktor eksternal</b>		<b>1</b>		<b>2.86</b>

Nilai faktor eksternal adalah 2.86 (lebih besar daripada 2.5). Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan eksternal memberikan peluang yang cukup baik bagi Sekretariat DPRD Kota Medan untuk berkinerja lebih baik.

### c. Analisis posisi strategis Sekretariat DPRD Kota Medan

Nilai yang dihasilkan dari matriks *IFAS* dan *EFAS* kemudian diletakan dalam matriks *SPACE* (*Strategic Position and Action Evaluation*). Hasil analisis posisi strategis adalah sebagaimana ditunjukkan dalam matriks berikut:



Gambar 5.1. Matriks Posisi Strategis Sekretariat DPRD Kota Medan

Berdasarkan matriks di atas, maka posisi strategis Sekretariat DPRD Kota Medan berada pada kuadran III. Pada posisi tersebut, lingkungan eksternal memberikan peluang yang baik bagi Sekretariat DPRD Kota Medan, akan tetapi di sisi lain kondisi internal tidak cukup bagus. Sebagai konsekuensinya, maka strategi yang harus dikembangkan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan secara umum berfokus pada upaya **“meminimalisir kelemahan untuk meraih peluang”**.

## 2. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Medan

Berdasarkan hasil analisis SWOT sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya dirumuskan strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun strategi Sekretariat DPRD Kota Medan adalah:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan.

Adapun arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebagai berikut.

1. Arah kebijakan Strategi 1, yaitu Meningkatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat DPRD Kota Medan.

2. Arah kebijakan Strategi 2, yaitu Meningkatkan Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Medan tahun 2021-2026 terdapat pada Tabel 5.3 berikut (Tabel T-C 26 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju, dan Kondusif</b>			
<b>Misi: Medan Bersih</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan	Meningkatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat DPRD Kota Medan
	Meningkatnya Kepuasan DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan terhadap Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju, dan Kondusif</b>			
<b>Misi: Medan Bersih</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	Medan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan		

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Berikut adalah rencana program Sekretariat DPRD Kota Medan beserta kegiatan dan subkegiatan yang bersifat indikatif :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, meliputi sejumlah kegiatan indikatif, yaitu:
  - a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.  
Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
    - 1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
    - 2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
    - 3) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik.
    - 4) Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama Oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
  - b. Pembahasan Kebijakan Anggaran  
Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
    - 1) Pembahasan KUA dan PPAS;
    - 2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
    - 3) Pembahasan APBD;
    - 4) Pembahasan APBD Perubahan;
    - 5) Pembahasan Laporan Semester;
    - 6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
  - c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  
Kegiatan ini mencakup sejumlah sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
  - 2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
  - 3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - 4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
  - 5) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
  - 6) Pengawasan Penggunaan Anggaran;
  - 7) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- d. Peningkatan Kapasitas DPRD
- Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
- 1) Orientasi DPRD;
  - 2) Pendalaman Tugas DPRD;
  - 3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
  - 4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
  - 5) Penyusunan Program Kerja DPRD.
  - 6) Publikasi dan Dokumentasi DPRD;
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.
- Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
- 1) Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
  - 2) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
  - 3) Pelaksanaan Reses.
- f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
- 1) Penyusunan Kode Etik DPRD;
  - 2) Pengawasan Kode Etik DPRD.
- g. Pembahasan Kerja Sama Daerah

Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:

- 1) Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah.

h. Fasilitasi Tugas DPRD

Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:

- 1) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
- 2) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, meliputi sejumlah kegiatan indikatif, yaitu:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD;
  - 5) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
- 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
  - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
  - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 7) Penyediaan Bahan/Material;
  - 8) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  - 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - 10) Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD;
  - 11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:

- 1) Pengadaan Mebel;
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pemeliharaan Mebel;
- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

- 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD  
Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
  - 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
  - 3) Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD.
- j. Layanan Administrasi DPRD  
Kegiatan ini mencakup sejumlah sub kegiatan, yaitu:
- 1) Fasilitasi Fraksi DPRD;
  - 2) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.

## 6.2 Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Indikator kinerja program digunakan untuk mengukur kinerja program. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur program Sekretariat DPRD Kota Medan, adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 6.1. berikut:

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Program

Program	Indikator Kinerja Program
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan

Selanjutnya, indikator kinerja kegiatan digunakan untuk mengukur kinerja masing-masing kegiatan. Adapun indikator kinerja subkegiatan digunakan untuk mengukur kinerja masing-masing subkegiatan. Indikator kinerja kegiatan dan subkegiatan yang merupakan bagian dari Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 6.2. berikut:

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan

<b>No</b>	<b>Kegiatan/ Subkegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan</b>
<b>1.</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>
	a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Program Peraturan Daerah
	b. Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda yang Difasilitasi
	c. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik yang Difasilitasi
	e. Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama Oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan
2.	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Indeks Kepuasan terhadap Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>
	a. Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Laporan Pembahasan KUA dan PPAS yang Difasilitasi
	b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Laporan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Difasilitasi
	c. Pembahasan APBD	Jumlah Laporan Pembahasan APBD yang Difasilitasi
	d. Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Laporan Pembahasan APBD Perubahan yang Difasilitasi
	e. Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Pembahasan Laporan Semester yang Difasilitasi
	f. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Laporan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang Difasilitasi
3.	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Indeks Kepuasan Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>
	a. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang Difasilitasi

No	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan
	b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang Difasilitasi
	c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Difasilitasi
	d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang Difasilitasi
	e. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Rapat Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang Difasilitasi
	f. Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Rapat Evaluasi Penggunaan Anggaran yang Difasilitasi
	g. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang Difasilitasi
4.	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Indeks Kepuasan terhadap Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD</b>

No	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan
	a. Orientasi DPRD	Jumlah Pelaksanaan Orientasi DPRD yang Difasilitasi
	b. Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD yang Difasilitasi
	c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang Disediakan
	d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Fraksi yang Disediakan Tenaga Ahli
	e. Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Rencana Kerja DPRD yang Disusun
	f. Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jenis Media Publikasi dan Dokumentasi yang Disediakan
<b>5.</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Indeks Kepuasan terhadap Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>
	a. Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah per Anggota DPRD
	b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Laporan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Difasilitasi
	c. Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses yang Difasilitasi

<b>No</b>	<b>Kegiatan/ Subkegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan</b>
<b>6.</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang Difasilitasi</b>
	a. Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD yang Difasilitasi
	b. Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Sosialisasi Kode Etik dan Tatib DPRD yang Difasilitasi
<b>7.</b>	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>Persentase Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah yang Difasilitasi</b>
	a. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Persetujuan Kerjasama Daerah yang Difasilitasi
<b>8.</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Indeks Kepuasan terhadap Fasilitasi Tugas DPRD</b>
	a. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Rapat Badan Musyawarah yang Difasilitasi
	b. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Indeks Kepuasan Fasilitasi Pimpinan DPRD

Indikator dari kegiatan dan subkegiatan yang merupakan bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 6.3 berikut.

Tabel 6.3. Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

No	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan
1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.</b>
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Disusun
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang Disusun
	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang Disusun
	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang Disusun
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

<b>No</b>	<b>Kegiatan/ Subkegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan</b>
	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Laporan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 2. Jumlah Dokumen Laporan Reformasi Birokrasi 3. Jumlah Dokumen Laporan Survei Kepuasan <i>Stakeholders</i> 4. Jumlah Dokumen Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan 5. Jumlah Dokumen Laporan Akselerasi Pelayanan melalui Inovasi Perangkat Daerah
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.</b>
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi Gaji dan Tunjangan yang Disediakan untuk ASN
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

<b>No</b>	<b>Kegiatan/ Subkegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan</b>
	Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD
	e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen laporan Prognosis Realisasi Anggaran
<b>3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu</b>
	a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun
	b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Disusun
<b>4.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah</b>
	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan

<b>No</b>	<b>Kegiatan/ Subkegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan</b>
	b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis
<b>5.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah</b>
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Alat Listrik dan Elektronik yang Disediakan
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jenis Barang Cetak yang Disediakan 2. Jumlah Penggandaan yang Disediakan
	f. Penyediaan Bahan/Material	Jenis Bahan/Material yang Disediakan
	g. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang Difasilitasi

No	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan
	h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Internal Sekretariat DPRD yang Diselenggarakan
	i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip
	j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi yang Termutakhirkan
<b>6.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU</b>
	a. Pengadaan Mebel	Jenis Mebel Kantor yang Disediakan
	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan
	c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan
	d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan

No	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan
7.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Layanan Surat Menyurat
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan
	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah Lokasi Pengamanan Kantor dan Rumah Pimpinan DPRD 2. Jumlah Lokasi Pelayanan Kebersihan Kantor 3. Jumlah Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani
8.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan</b>
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya

No	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas operasional roda empat yang dipelihara 2. Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua yang dipelihara
	c. Pemeliharaan Mebel	Jenis mebel yang dipelihara/ diperbaiki
	d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/ Diperbaiki
	e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
	f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara/ Direhabilitasi
	g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara

No	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan
9.	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>
	a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Frekuensi gaji dan tunjangan yang disediakan untuk DPRD
	b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jenis Pakaian Dinas DPRD yang Disediakan
	c. Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang diperiksa kesehatannya
10.	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Layanan Administrasi DPRD</b>
	a. Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Fraksi yang Difasilitasi
	b. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Paripurna yang Difasilitasi

### 6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah pihak yang akan menerima manfaat dari program dan kegiatan. Pada program dan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kota Medan, kelompok sasaran adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan, Sekretariat DPRD Kota Medan, Perangkat

Daerah Kota Medan, Masyarakat/ Konstituen, dan Sekretariat DPRD Sejawat.

#### **6.4 Pendanaan Indikatif**

Secara umum sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Medan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan. Adapun pendanaan indikatif untuk pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel. 6.4. Kerangka Pendanaan Indikatif

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		58.156.478.939	112.049.560.955	153.787.502.947	154.058.755.308	163.307.580.626,48	173.106.035.464,07	
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.834.787.743	4.759.440.698	4.862.909.821	68.594.194.480	72.709.845.148.80	77.072.436.917.73	
	a Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.423.970.010	1.909.034.825	534.520.473	570.974.547	605.233.017.82	641.547.001.01	
	b Pembahasan Rancangan Perda	2.038.120.233	2.655.243.373	3.917.628.795	2.418.722.825	2.563.846.194.50	2.717.676.966.17	
	c Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	372.697.500	195.162.500	410.760.553	396.708.708	420.511.230.48	445.741.904.31	
d Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama Oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	0	0	0	65.207.788.400	69.120.255.704	73.267.471.046.24		
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.850.891.401	3.741.648.845	3.037.689.632	4.024.147.580	4.265.596.434.80	4.521.532.220.89	
a	Pembahasan KUA dan PPAS	360.046.437	719.748.129	544.115.805	558.866.068	592.398.032.08	627.941.914	

Perubahan Rencana Strategis 2021-2026

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	
b	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	248.514.997	870.615.674	715.900.925	801.744.000	849.848.640	900.839.558.40	
c	Pembahasan APBD	249.087.210	873.547.229	599.326.750	560.076.750	593.684.355	629.302.236.30	
d	Pembahasan APBD Perubahan	613.299.808	354.788.730	189.985.247	1.069.854.217	1.134.045.470.02	1.202.088.198.22	
e	Pembahasan Laporan Semester	0	0	0	12.128.140	12.855.828.40	13.627.178.10	
f	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	379.942.949	922.979.083	0	1.021.478.405	1.082.767.109.30	1.147.733.135.86	
<b>3</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>23.197.899.036</b>	<b>32.019.155.863</b>	<b>35.343.644.700</b>	<b>34.261.141.113</b>	<b>36.316.809.579.78</b>	<b>38.495.818.154.57</b>	
a	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	6.228.401.924	8.094.976.406	9.772.579.984	8.203.873.190	8.696.105.581.40	9.217.871.916.28	
b	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	6.701.546.887	9.598.341.468	10.114.694.637	9.427.338.820	9.992.979.149.20	10.592.557.898.15	
c	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.669.015.516	7.044.782.830	7.569.295.981	8.269.653.000	8.765.832.180	9.291.782.110.80	
d	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	5.587.067.109	7.194.951.409	7.887.074.098	8.274.748.778	8.771.233.704.68	9.297.507.726.96	

Perubahan Rencana Strategis 2021-2026

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1		2	3	4	5	6	7
e	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0	0	0	14.907.385	15.801.828.10	16.749.937.79
f	Pengawasan Penggunaan Anggaran	0	75.273.550	0	13.794.035	14.621.677.10	15.498.977.73
g	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	11.867.600	10.830.200	0	56.825.905	60.235.459.30	36.849.586.86
<b>4</b>		<b>12.123.190.150</b>	<b>53.575.544.193</b>	<b>76.905.467.013</b>	<b>18.222.751.840</b>	<b>19.316.116.950.40</b>	<b>20.475.083.967.42</b>
a	Orientasi DPRD	0	0	0	401.400.000	0	0
b	Pendalaman Tugas DPRD	453.188.611	569.836.086	991.147.425	1.301.000.000	1.379.060.000	1.461.803.600
c	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	7.913.151.300	49.090.899.750	71.995.235.288	0	0	0
d	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.699.045.000	2.774.663.825	2.740.047.425	2.726.500.000	2.890.090.000	3.063.495.400
e	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	725.105.000	723.429.395	720.346.925	720.277.608	763.494.264.48	809.303.920.35
f	Penyusunan Program Kerja DPRD	332.700.239	416.715.137	458.683.950	1.258.123.552	1.333.610.965.12	1.413.627.623.03
g	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	0	0	0	11.815.450.680	12.524.377.720.80	13.275.840.384.05
<b>5</b>		<b>11.764.332.431</b>	<b>17.245.018.212</b>	<b>22.771.811.973</b>	<b>15.479.959.609</b>	<b>16.408.757.185.54</b>	<b>17.393.282.616.67</b>
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							

Perubahan Rencana Strategis 2021-2026

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	
a	Kunjungan Kerja dalam Daerah	5.700.000	0	0	17.526.650	18.578.249	19.692.943,94	
b	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	48.020.275	2.186.000	0	223.598.539	237.014.451,34	251.235.318,42	
c	Pelaksanaan Reses	11.710.612.156	17.242.832.212	22.771.811.973	15.238.834.420	16.153.164.485,20	17.122.354.354,31	
<b>6</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>372.847.634</b>	<b>708.843.144</b>	<b>253.281.155</b>	<b>253.106.910</b>	<b>268.293.324.60</b>	<b>284.390.924.08</b>	
a	Penyusunan Kode Etik DPRD	5.010.650	105.705.225	0	0	0	0	
b	Pengawasan Kode Etik DPRD	367.836.984	603.137.919	253.281.155	253.106.910	268.293.324,60	284.390.924,08	
<b>7</b>	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>42.850.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.443.000.000</b>	<b>2.589.580.000</b>	<b>2.744.954.800</b>	
a	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	42.850.500	0	0	2.443.000.000	2.589.580.000	2.744.954.800	
<b>8</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>4.969.680.044</b>	<b>7.894.002.571</b>	<b>10.612.704.653</b>	<b>10.785.453.776</b>	<b>11.432.581.002.56</b>	<b>12.118.535.862.71</b>	
a	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	0	0	0	0	0	0	
b	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.194.923.044	1.638.402.619	423.844,268	553.713.391	586.936.194,46	622.152.366,13	
c	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3.774.757.000	6.255.599,952	10.188.860,385	10.231.740,385	10.845.644,808,10	11.496.383,496,59	

Perubahan Rencana Strategis 2021-2026

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
1		2	3	4	5	6	7		
Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		99.115.093.407	96.960.058.005	107.267.425.568	107.297.172.350	113.723.460.245	120.546.867.859.70		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.056.435.781	3.494.565.473	3.439.579.098	3.098.562.482	3.284.476.230.92	3.481.544.804.78		
		a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	490.309.963	795.342.320	441.897.742	468.411.606.52	496.516.302.91
		b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	67.763.903	0	0	152.542.210	161.694.742.60	171.396.427.16
		c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.117.532	0	0	152.032.210	161.154.142.60	170.823.391.16
		d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.599.734	0	0	152.032.210	161.154.142.60	170.823.391.16
		e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.238.670	0	0	152.032.210	161.154.142.60	170.823.391.16
		f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	621.296.386	509.836.520	305.551.820	323.884.929.20	343.318.024.95
g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	952.715.942	2.382.959.124	2.033.798.158	1.742.474.080	1.847.022.524.80	1.957.843.876.29		

Perubahan Rencana Strategis 2021-2026

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.938.203,081</b>	<b>8.571.822,193</b>	<b>9.965.994,630</b>	<b>10.475.253,923</b>	<b>11.103.769,158,38</b>	<b>11.769.995,307,88</b>	
	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.486.944,600	8.071.430,567	9.269.439,910	9.896.060,526	10.489.824,157,56	11.119.213,607,01
	b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	244.129,416	342.039,213	425.945,820	385.045,247	408.147,961,82	432.636,839,53
	c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	71.005,200	16.895,860	129.737,720	82.959,260	87.935,815,60	93.213,014,54
	d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	107.005,200	88.107,505	76.963,260	39.419,260	41.784,415,60	44.291,480,54
	e	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	28.648,000	53.349,048	63.907,920	67.742,395	76.075,807,80	80.640,356,27
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>361.246,327</b>	<b>423.097,105</b>	<b>615.142,590</b>	<b>578.103,316</b>	<b>612.789,514,96</b>	<b>649.556,885,86</b>	
	a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	156.169,005	159.053,088	168.596,273,28	178.712,049,68
	b	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	361.246,327	423.097,105	458.973,585	419.050,228	444.193,241,68	470.844,836,18

Perubahan Rencana Strategis 2021-2026

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		1	2	3	4	5	6	7
4	<b>Administrai Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>22.666.256.786</b>	<b>3.208.038.876</b>	<b>2.926.974.000</b>	<b>3.029.495.108</b>	<b>3.211.264.814.48</b>	<b>3.403.940.703.35</b>	
	a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	376.901.015	991.246.558	523.750.625	678.057.700	718.741.162	761.865.631.72	
	b Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21.086.934.650	0	0	0	0	0	
	c Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	1.202.421.121	2.216.792.318	2.403.223.375	2.351.437.408	2.492.523.652.48	2.642.075.071.63	
5	<b>Administrai Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4.085.371.291</b>	<b>5.646.942.319</b>	<b>8.571.340.715</b>	<b>11.488.418.081</b>	<b>12.166.180.719.86</b>	<b>12.896.151.563.05</b>	
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	226.833.392	671.027.595	404.465.500	241.316.968	255.795.986.08	271.146.745.24	
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	914.384.536	704.024.350	2.024.396.553	4.787.351.314	5.074.592.392.84	5.379.067.936.41	
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.458.800	0	234.526.537	362.867.276	384.639.312.56	407.717.671.31	
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	374.824.166	341.833.130	316.083.355	328.105.480	347.791.808.80	368.659.317.33	
	e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	256.464.175	803.552.500	1.153.204.125	936.092.600	992.258.156	1.051.793.645.36	

Perubahan Rencana Strategis 2021-2026

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1		2	3	4	5	6	7
f	Penyediaan Bahan/Material	252.775.230	553.496.750	1.277.480.830	1.148.607.670	1.217.517.773.20	1.290.568.836.41
g	Facilitasi Kunjungan Tamu	155.529.200	548.507.205	485.417.970	391.717.975	415.221.053.50	440.134.316.71
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.717.000	338.362.095	281.772.210	659.602.000	699.178.120	741.128.807.20
i	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	0	163.065.964	512.546.285	1.017.876.140	1.067.406.262.40	1.131.450.638.14
j	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.750.384.792	1.523.072.730	1.881.447.350	1.614.886.658	1.711.779.857.48	1.814.486.648.93
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.789.610.060</b>	<b>7.812.691.337</b>	<b>4.680.731.863</b>	<b>2.308.927.478</b>	<b>2.447.463.126.68</b>	<b>2.594.310.915.28</b>
a	Pengadaan Mebel	310.444.450	259.567.533	318.905.125	638.504.500	676.814.770	717.423.656.20
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.965.525	5.337.223.554	3.251.541.022	655.462.978	694.790756.68	736.478.202.08
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	434.964.701	875.570.825	261.575.166	169.891.500	180.084.990	190.890.089.40

Perubahan Rencana Strategis 2021-2026

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1		2	3	4	5	6	7
d	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.852.235.384	1.340.329.425	848.710.550	845.068.500	895.772.610	949.518.966,60
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>9.473.434.763</b>	<b>10.369.043.517</b>	<b>11.986.961.060</b>	<b>11.872.478.284</b>	<b>12.584.826.981.04</b>	<b>13.339.916.599.90</b>
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	324.272.232	372.412.280	430.845.725	446.175.821	472.945.373,44	501.323.155,85
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.995.203.218	2.391.519.894	2.912.188.210	2.673.430.960	2.833.836.817,60	3.003.867.026,66
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	375.172.701	401.835.485	343.419.700	370.490.000	392.719.400	416.282.564
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.778.786.612	7.203.275.858	8.300.507.425	8.382.381.500	8.885.324.390	9.4418.443.853,40
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.303.903.530</b>	<b>8.510.814.837</b>	<b>11.539.119.675</b>	<b>9.412.170.488</b>	<b>9.976.900.717.28</b>	<b>10.575.514.760.32</b>
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	658.622.400	472.194.064	1.015.759.075	658.858.700	698.390.222	740.293.635,32

Perubahan Rencana Strategis 2021-2026

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.130.571.450	1.472.039.542	1.034.443.345	899.013.220	952.954.013.20	1.010.131.253.99	
c	Pemeliharaan Mebel	0	122.047.455	200.273.525	200.277.608	212.294.264.48	225.031.920.35	
d	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.406.984.489	1.211.916.804	1.684.944.625	1.318.700.000	1.397.822.000	1.481.691.320	
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.802.400.322	3.801.219.707	6.130.412.625	4.821.000.000	5.110.260.000	5.416.875.600	
f	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	925.947.387	845.459.310	891.390.375	999.345.480	1.059.308.208.80	1.122.864.581.33	
g	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	379.377.482	585.937.975	581.896.105	514.975.480	545.874.008.80	578.626.449.33	
<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>		<b>39.588.550.186</b>	<b>54.417.309.595</b>	<b>49.665.306.392</b>	<b>50.486.075.100</b>	<b>53.515.239.606</b>	<b>26.726.153.982.36</b>	
a	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	38.639.476.175	44.446.113.073	48.044.844.492	50.927.535.162	51.276.356.781.52	54.352.938.188.41	

Perubahan Rencana Strategis 2021-2026

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	
b	Penyediaan Pakaiannya Dinas dan Atribut DPRD	862.050.211	865.383.167	1.319.988.250	1.399.187.545	1.920.376.560	2.035.599.153.60	
c	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	87.023.800	105.813.355	300.473.650	218.502.069	318.506.264.48	337.616.640.35	
<b>10</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>743.368.748</b>	<b>3.505.732.733</b>	<b>3.876.275.545</b>	<b>4.547.688.090</b>	<b>4.820.549.375.40</b>	<b>5.109.782.337.92</b>	
a	Facilitasi Fraksi DPRD	44.331.848	1.901.125.880	1.925.956.665	2.041.514.065	2.108.919.989.60	2.235.455.188.98	
b	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	699.036.900	1.604.606.853	1.950.318.880	2.067.334.515	2.711.629.385.80	2.874.327.148.95	
<b>11</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>2.408.678.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a	Facilitasi Keprotokolan	2.408.678.690	0	0	0	0	0	
<b>12</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>1.691.034.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	730.126.778	0	0	0	0	0	
b	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	878.025.006	0	0	0	0	0	

Perubahan Rencana Strategis 2021-2026

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		2	3	4	5	6	7
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	82.882.380	0	0	0	0	0

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif terdapat pada Tabel 6.5 pada lampiran renstra ini (Tabel T-C 27 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

**BAB VII****KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka mengukur kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangannya, diperlukan sejumlah indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud tentunya harus mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Dengan demikian, indikator yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan ini, secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

Indikator kinerja yang berhubungan dengan bidang urusan ini disebut juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, dirumuskan sejumlah IKU Sekretariat DPRD. IKU ini sangat penting, selain untuk keperluan pengukuran kinerja pada tahun berjalan, juga digunakan untuk mengukur perkembangan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan dalam beberapa tahun.

Adapun IKU Sekretariat DPRD Kota Medan, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 7.1. berikut.

Tabel 7.1.

IKU Sekretariat DPRD Kota Medan

<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI</b>
Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan	Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan
Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan	Hasil Survei Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan

Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran P-RPJMD, ditunjukkan dalam Tabel 7.2 berikut (Tabel T-C.28 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun n 1	Tahun 2	Tahun n 3	Tahun n 4	Tahun n 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai SAKIP	68 (B)	68 (B)	70.45 (BB)	72 (BB)	74 (BB)	77 (BB)	81 (A)

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan peranan pimpinan puncak untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dirumuskannya perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Medan berarti mengatur arah pengembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan melibatkan staf Sekretariat DPRD Kota Medan, antar instansi, masyarakat, dan lembaga-lembaga swasta.

Dengan telah ditentukannya visi dan misi sebagai tujuan idealis perubahan Renstra yang tergambar dipikiran pembuat/ perumus perubahan Renstra ini, maka akan dapat dicapai melalui kerja sama yang baik antara Sekretariat DPRD Kota Medan dengan DPRD Kota Medan. Perencanaan strategis berkembang menjadi sarana operasional Sekretariat DPRD Kota Medan sesuai dengan perubahan yang terjadi, secara internal sangat lambat dibandingkan dengan perubahan pada lingkungan eksternal instansi terutama dalam masalah-masalah ekonomi dan teknologi.

Berhasilnya pembangunan Kota Medan sebagai subsistem pembangunan nasional menuntut peran aktif masyarakat, yang dilandasi oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, serta disiplin para penyelenggara untuk memperoleh keberhasilan yang maksimal diperlukan adanya persamaan persepsi dan pemahaman tentang tujuan pembangunan, baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat. Dalam meningkatnya tanggung jawab bersama dan demi semakin efektifnya pelayanan kepada DPRD, perlu ditumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam menyiapkan berbagai perangkat kebijaksanaan dalam pembangunan daerah yang hasilnya dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh

masyarakat sebagai implementasi visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan.

Akhirnya Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Medan ini merupakan subsistem dari perencanaan pembangunan nasional sebagai perwujudan pengamalan Pancasila yang akan menghantarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik, selaras, serasi dan seimbang.

Medan, Desember 2023

**SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN,**



**MUHAMMAD ALI SIPAHUTAR, S.STP., M.A.P**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19790317 199912 1 001**



**BerAKHLAK** # bangga melayani bangsa

# **KOLABORASI MEDAN BERKAH**



**SEKRETARIAT  
DPRD KOTA MEDAN**

**PLANNING**

 **SMART - WAN**